

ABSTRAK SKRIPSI

Pertumbuhan pariwisata Indonesia sungguh mengagumkan. Hal itu bisa dilihat dari angka perolehan devisa yang terus meningkat. Pada tahun 1995 perolehan devisa sektor ini mencapai US\$ 5.312 juta (1,43%) atau ranking 19 dunia. Kenyataan tersebut memacu pemerintah untuk mencanangkan proyeksi penerimaan devisa sektor pariwisata pada Pelita VI sebesar US\$ 8,9 miliar dan Pelita VII sebesar US\$ 15,0 miliar. Target wisatawan yang dicanangkan 11 juta wisman dan 90 juta wisnus, meskipun tahun 1997 penerimaan devisa menurun akibat memanasnya suhu politik yang diakibatkan oleh pesta demokrasi. Secara akumulatif akhir tahun ini tetap terjadi peningkatan.

Bagi Indonesia, kedudukan sektor pariwisata ini sangat vital dalam perekonomian karena sumbangannya sebagai penghasil devisa negara. Dilihat dari angka perolehannya yang terus meningkat, dengan pertumbuhan rata-rata 18% pertahun selama 10 tahun terakhir, industri pariwisata telah menempatkan diri sebagai salah satu sektor penyumbang devisa yang potensial.

Dengan prospek industri pariwisata yang cerah ini, apalagi dengan semakin meningkatnya pengeluaran wisatawan yang berkunjung ke Indonesia maka berdampak bagi peningkatan produk layanan di sektor pariwisata. Mereka yang bergerak di sektor ini berlomba-lomba untuk memberikan mutu pelayanan yang terbaik. Hotel merupakan industri jasa yang sarat tuntutan kualitas pelayanan. Tanpa memiliki keunggulan dan daya saing dalam melayani tamu, hotel tersebut berangsur-angsur ditinggalkan wisatawan. Disamping itu sebuah hotel dianggap memiliki kelas, jika lengkap prasarannya.

Dengan semakin menjamurnya jumlah hotel di Surabaya, tentunya hal ini menimbulkan persaingan dalam bisnis perhotelan. Persaingan ini tidak sebatas pada mutu layanan saja tapi juga termasuk persaingan tarif. Persaingan dalam bentuk perang tarif ini bertujuan untuk mendongkrak tingkat hunian kamar hotel. Hal ini dikarenakan transaksi dari penjualan kamar hotel merupakan transaksi utama operasional badan usaha sehari-hari.

Karena transaksi penjualan kamar pada industri perhotelan merupakan transaksi operasional setiap hari yang penting dengan volume yang sering dan dalam jumlah yang material maka dibutuhkan adanya pengawasan untuk menjamin agar tidak timbul kekurangan-kekurangan dan penyelewengan-penyelewengan yang berakibat kerugian pada badan usaha.

Masalah yang timbul dari hotel "X" adalah adanya pemberian diskon tambahan yang besarnya relatif tergantung dari lamanya menginap dan

kesepakatan yang telah disepakati bersama. Pemberian diskon tambahan ini bisa saja dimanfaatkan oleh pihak yang bertanggung jawab dengan cara menggelapkannya atau dimasukkan ke dalam kantong sendiri. Selain itu masalah lain yang timbul adalah disebabkan karena badan usaha belum mempunyai struktur organisasi yang memadai yang dapat berakibat buruk bagi badan usaha, karena mungkin saja terjadi penjualan kamar yang tidak dilaporkan atau tidak dicatat. Kurangnya pengawasan dalam penggunaan dan pemberian otorisasi pada formulir-formulir yang berkaitan dengan pendapatan serta kurang lengkapnya formulir-formulir yang berkaitan dengan penjualan kamar sehingga kurang mendukung terciptanya suatu sistem pengendalian internal yang baik, juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh badan usaha ini.

Melihat luasnya lingkup pembahasan maka dibatasi dalam hal pengujian pengendalian internal terhadap siklus pendapatan dari departemen operasional khususnya yang berhubungan dengan penjualan kamar. Untuk menguji apakah pengendalian internal pada hotel "X" memadai atau tidak maka dilakukan compliance test atas siklus pendapatan yang dilakukan dengan mengevaluasi sistem pengendalian internal atas penjualan yang merupakan bagian dari siklus pendapatan.

Evaluasi atas sistem pengendalian internal terhadap siklus pendapatan ini ditujukan untuk memperoleh gambaran umum atas pelaksanaan ataupun perubahan yang mungkin ada pada sistem pengendalian internal dan untuk mengevaluasi apakah sistem tersebut sesuai dengan apa yang telah digariskan. Pengujian kepatuhan disini lebih ditujukan pada unsur pengendalian internal badan usaha. Dari situ kita dapat melihat apakah pengendalian internal badan usaha sudah dijalankan sesuai dengan apa yang telah digariskan sehingga dapat menjamin kekayaan badan usaha pada akhirnya.